ABSTRAK

Penguasaan dan kepemilikan tanah tanpa dilengkapi sertipikat masih banyak terjadi dalam masyarakat, salah satunya dengan bukti penguasaan tanah dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), SKGR merupakan keterangan atas penguasaan atau kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh camat yang hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah yang berupa alas hak. Di Kabupaten Karimun terjadi sebuah sengketa batas tanah antara pemilik SKGR dan sertipikat, berawal dari mediasi yang tidak menemukan solusi, maka dilanjutkan dengan jalur litigasi, dikarenakan SKGR tersebut sudah lebih dahulu diterbitkan oleh camat dan pada kasus ini dimenangkan oleh sertipikat, sehingga perlu untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan pemegang sertipikat dimenangkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang penyebab pemegang SKGR dalam kasus sengketa tanah pada Putusan MA Nomor 1257 K/Pdt/2017 tidak mendapatkan perlindungan hukum, serta mengkaji keselarasan nilai keadilan terhadap penyelesaian sengketa melalui hasil pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor 1257 K/Pdt/2017.

Metode penelitian dilakukan secara yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian evaluatif analisis. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer, yang diperoleh dari pendekatan undang-undang dan studi kasus, serta data sekunder berfungsi untuk melengkapi data primer. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian tentang penyebab tidak adanya perlindungan hukum yang didapatkan oleh pemegang SKGR dalam kasus tersebut dikarenakan SKGR merupakan alas hak yang kapasitasnya hanya sebatas petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah, SKGR tidak memiliki kedudukan yang imbang dengan sertipikat, sehingga hakim lebih mengedepankan pembuktian yang secara *legal reasoning* sudah memiliki payung hukum. Keselarasan nilai keadilan dalam penyelesaian sengketa tersebut tentunya sudah terpenuhi secara normatif untuk pemegang sertipikat, dikarenakan sertipikat merupakan produk dari pendaftaran tanah yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum, sedangkan untuk pemegang SKGR yang sudah lebih dahulu menempati dan mengurus tanah tersebut sebagai bentuk pelaksanaan fungsi sosial tanah maka dirasa putusan yang dikemukakan Mahkamah Agung seharusnya dapat memberikan keadilan untuk sebuah kemanfaatan.

Kata Kunci: Kekuatan Hukum, SKGR, Alas Hak

ABSTRACT

Land tenure and ownership without a certificate still occurs a lot in society, one of which is with proof of land tenure with a Compensation Certificate (SKGR), SKGR is a statement of control or ownership of land issued by the sub-district head that can only be used as a guide in the context of land registration in the form of a legal basis. In Karimun Regency, there was a land boundary dispute between the owner of the SKGR and the certificate, starting from mediation that didn't find a solution, then continued with litigation, because the SKGR had already been issued by the sub-district head and in this case won by the certificate, so its necessary to examine the factors that caused the certificate holder to win.

This study aims to determine and analyze the causes of SKGR holders in land dispute cases in Supreme Court Decision Number 1257 K/Pdt/2017 not getting legal protection, and to examine the harmony of justice values in dispute resolution through the results of the judge's considerations in deciding Case Number 1257 K/Pdt/2017.

The research method is conducted in a juridical-normative manner with the specification of evaluative analysis research. The data collected consists of primary data, obtained from the approach of laws and case studies, and secondary data serves to complement the primary data. Data analysis is carried out qualitatively by concluding deductively.

The results of the study on the causes of the absence of legal protection obtained by SKGR holders in the case are because SKGR is a basis of rights whose capacity is only limited to instructions in the context of land registration, SKGR does not have an equal position with a certificate, so the judge prioritizes evidence that legally reasoning already has a legal protection. The harmony of the value of justice in resolving the dispute has certainly been fulfilled normatively for certificate holders, because certificates are products of land registration that provide protection and legal certainty, while for SKGR holders who have previously occupied and managed the land as a form of implementing the social function of the land, it is felt that the decision issued by the Supreme Court should be able to provide justice for a benefit.

Keywords: Legal Strength, SKGR, Basis of Right